

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa pendapat mengenai definisi kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan upah minimum. Selain itu, pada bagian ini juga akan mendiskusikan mengenai beberapa penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis berdasarkan kajian dan penelitian-penelitian tersebut.

2.1. Landasan Teori

Pada bagian landasan teori akan dijelaskan mengenai definisi yang berhubungan dengan judul penelitian antara lain mengenai kemiskinan, Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan upah minimum.

2.1.1. Definisi Kemiskinan

Menurut World Bank (1990), kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sifatnya multidimensional dan ada berbagai macam definisi kemiskinan mulai dari ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga definisi kemiskinan yang mempertimbangkan komponen sosial. Definisi kemiskinan yang paling umum dan sering kali digunakan sebagai perhitungan tingkat kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk mencapai standar minimum. Kemiskinan adalah kehilangan atas aset-aset penting dan segala peluang yang berhak dimiliki oleh setiap manusia. Setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan dasar dan

akses terhadap pelayanan kesehatan. Rumah tangga miskin juga memiliki hak untuk mempertahankan hak mereka dalam hal pekerjaan (*Asian Development Bank*, 1999).

Apabila hal ini tidak diberdayakan agar mereka mampu berpartisipasi dan membuat keputusan yang menentukan hidup mereka, maka mereka akan tetap menjadi miskin. Oleh karena itu, *Asian Development Bank* berpendapat bahwa kemiskinan sebaiknya diukur tidak hanya dari segi pendapatan, pekerjaan, dan upah, tetapi kemiskinan juga diukur melalui pendidikan dasar, kesehatan, gizi, serta air dan sanitasi. Adapun hal lainnya yang patut diperhatikan adalah perasaan ketidakberdayaan dan kurangnya kebebasan untuk berpartisipasi. Ciri-ciri utama yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan di negara berkembang antara lain adalah sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dapat menyebabkan jumlah penduduk buta huruf meningkat dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Ciri lainnya adalah buruknya sarana kesehatan dan pola konsumsi yang akan berdampak pada minimnya tenaga kerja produktif. Akhirnya, laju pertumbuhan ekonomi terhambat (Jhingan, 2000).

Kemiskinan di Indonesia adalah masalah yang bersifat multidimensional yang menyangkut pemenuhan hak dasar seperti terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya akses terhadap air bersih dan aman, serta sanitasi, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa aman dan lemahnya partisipasi. Selain itu, permasalahan kemiskinan

juga menyangkut ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, beban kependudukan dan kesenjangan antarwilayah (Bappenas, 2009).

Menurut Chambers (1983), hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Masyarakat yang termasuk golongan miskin sulit mendapatkan akses ke layanan publik, seperti pendidikan. Jika masyarakat miskin tidak mampu memperbaiki pendidikan, maka generasinya akan terus menerus mendapatkan pendidikan yang rendah. Pendapatan yang dimilikinya juga tidak meningkat sehingga tidak mampu mewariskan banyak harta kepada generasi berikutnya keluarganya dapat terjebak dalam kemiskinan dari generasi ke generasi. Hal ini disebut dengan jebakan kemiskinan atau *poverty trap*. Namun, jika masyarakat tersebut dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan, maka dapat keluar dari *poverty trap* tersebut (Todaro & Smith, 2012).

2.1.2. Bentuk Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2011), terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan Relatif

Ketimpangan distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan kemiskinan merupakan definisi dari kemiskinan relatif.

Fokus perhatian pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran merupakan dasar dari penyusunan standar minimum kondisi hidup suatu negara. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin.

2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Ukuran finansial dalam bentuk uang merupakan penerjemahan dari kebutuhan pokok minimum. Nilai kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan.

2.1.3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2009), penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Menurut Todaro dan Smith (2012), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pertumbuhan yang sangat lambat bahkan ada beberapa yang mengalami stagnansi akibat pendapatan per kapita negara-negara yang masih rendah.
3. Timpangnya distribusi pendapatan.
4. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Banyaknya penyakit yang mewabah sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju akibat dari fasilitas dan pelayanan kesehatan yang buruk dan sangat terbatas.

Kartasasmita (1996) juga menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan di mana akibat dari berbagai faktor yang terdiri dari:

1. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pengembangan diri yang terbatas.
2. Rendahnya tingkat kesehatan di mana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi rendah pula. Dengan demikian, produktivitas yang dihasilkan menjadi berkurang, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Akibat dari hal ini adalah *bargaining position* mereka hampir seluruh kegiatan ekonomi menjadi lemah.

3. Terbatasnya lapangan kerja. Selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat dilakukan.
4. Kondisi keterisolasian. Dalam kondisi terpencil atau terisolasi, penduduk akan kurang mampu menjalankan roda perekonomiannya.

2.1.4. Ukuran Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin, sebaran, dan kondisi kemiskinan dapat diketahui dengan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga mampu secara efektif untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan. Pengurangan kemiskinan yang baik akan memungkinkan dalam melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya (*World Bank Institute, 2005*). Bank Dunia (2015) menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 1,30 dollar AS per kapita per hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2017) mengukur tingkat kemiskinan dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan

2100 kilokalori per kapita per hari dari 52 jenis komoditi sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan merupakan kesehatan. Komoditi di perkotaan sebanyak 51 jenis komoditi dan komoditi di pedesaan sebanyak 47 jenis komoditi mewakili paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan. Indikator kemiskinan yang digunakan untuk pendektan kebutuhan dasar yaitu:

1. *Head Count Index* (P_0) yang merupakan persentase penduduk atau rumah tangga miskin yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (P_1) atau yang biasa dikenal sebagai indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (P_2) atau biasa dikenal dengan indeks keparahan kemiskinan yang berisi informasi mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Menurut Mankiw (2009) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam satu perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Nilai pasar dalam pengertian tersebut merupakan suatu ukuran jumlah tertentu yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat pada komoditas yang berbeda, masing-masing mencerminkan nilai dari komoditas yang bersangkutan yang meliputi seluruh macam barang yang dijual di pasar secara legal.

Ditekankan pula bahwa yang masuk dalam penghitungan PDB hanyalah barang akhir, ini dilakukan karena nilai barang setengah jadi sudah termasuk ke dalam harga barang jadi. Penambahan nilai pasar dari barang setengah jadi akan menyebabkan penghitungan ganda dari harga suatu komoditas.

PDB nominal merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai pada harga terkini atau harga yang berlaku sedangkan PDB riil merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai pada harga tetap. PDB riil menunjukkan apa yang akan terjadi terhadap pengeluaran atas output jika jumlah berubah namun harga tetap (Mankiw, 2009).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat diukur dengan pertumbuhan PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah.

Menurut Todaro (2012), kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok merupakan cerminan dari PDRB per kapita di suatu daerah. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Selain berhubungan dengan kemampuan pendapatan, tingkat kemiskinan juga berhubungan dengan distribusinya pada masyarakat di suatu daerah.

BPS (2008), menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal disuatu wilayah maka akan diperoleh angka PDRB per kapita. Rumusan PDRB per kapita secara sistematis adalah:

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{Jumlah \text{ penduduk pertengahan tahun}}$$

Angka PDRB dapat diperoleh melalui dua pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran yang selanjutnya menurut Badan Pusat Statistik dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut pendekatan lapangan usaha

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

2. Menurut pendekatan pengeluaran

PDRB dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi. PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi konsumsi di mana Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) menjadi bagian terpisah yang sebelumnya merupakan bagian dari konsumsi rumah tangga. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRM, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

2.1.6. Hubungan PDRB Per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith (2012), tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Tingkat kemiskinan akan tetap parah walaupun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara tinggi tetapi distribusi pendapatannya tidak merata. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan luas meskipun distribusi pendapatan di suatu negara telah merata.

Menurut Sadono Sukirno (2002), kenaikan PDRB tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil merupakan laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya distribusi pendapatan perlu diperhatikan karena pembangunan

ekonomi tidak hanya diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Banyak rumah tangga miskin yang terpaksa mengubah pola hidupnya dengan beralih ke barang yang lebih murah akibat tingkat pendapatan penduduk yang terbatas.

Menurut Thamrin (2001), potensi sumber penerimaan daerah semakin besar karena tingginya PDRB per kapita suatu daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Artinya jumlah penduduk miskin akan berkurang seiring dengan semakin tingginya PDRB per kapita yang akan berdampak pada semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

2.1.7. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang mendasar karena pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga (Todaro & Smith, 2012). Pada negara berkembang, untuk menyerap teknologi modern dan pengembangan kapasitas diperlukan pendidikan yang sangat baik. Teknologi yang modern dan pengembangan kapasitas bertujuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan, menyerap, dan menyebarluaskan pengetahuan. Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi (UNDP, 1997).

Variabel yang menggambarkan tingkat pendidikan salah satunya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Definisi rata-rata lama sekolah menurut BPS

(2015) adalah jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan tidak termasuk tahun yang mengulang. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan di suatu daerah yang mulai berkembang dan sudah semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan. Hal itu penting karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.1.8. Hubungan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Tujuan yang mendasar dari pembangunan adalah pendidikan (Todaro & Smith, 2012). BPS (2015) mengemukakan bahwa pendidikan mampu meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Individu yang berpendidikan akan memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak dan secara tidak langsung akan mengurangi peluang seseorang tersebut untuk menjadi miskin.

Pendidikan (formal dan nonformal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 1999). Pengetahuan dan keahlian akan meningkat karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang sehingga mendorong produktivitas meningkat. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada

yang bersangkutan. Harapannya, seseorang akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan dari peningkatan pendapatan dan konsumsinya. Seseorang yang memiliki kesejahteraan yang lebih baik seiring dengan produktivitas yang tinggi.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu, Sinaga, Oktaviani, & Tambunan, 2004).

2.1.9. Kesehatan

Kesehatan didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental, serta sosial, dan bukan hanya sekadar bebas dari penyakit dan kelemahan fisik (Callahan, 1973). Kesehatan juga merupakan inti dari kesejahteraan dan hal ini merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas sebagai inti makna pembangunan. Apabila dilihat lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih prima dan produktif sehingga akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi (Todaro & Smith, 2012).

Ekonomi kesehatan merupakan penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga menurut Mills dan Gilson (1995), ekonomi kesehatan ada kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
- b. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- c. Pembiayaan serta pengorganisasian dari berbagai pelayanan kesehatan.
- d. Efisiensi penggunaan dan pengalokasian dari banyak sumber daya.
- e. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan merupakan pondasi dari kapasitas untuk bekerja di sekolah serta produktivitas dalam bekerja. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Pada tingkat makro, penurunan kemiskinan serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang dapat terjadi seiring dengan banyaknya penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik (Atmawikarta, 2002).

Salah satu variabel yang menggambarkan tingkat kesehatan adalah angka harapan hidup. BPS mendefinisikan angka harapan hidup sebagai suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu masyarakat mengindikasikan tingginya derajat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH merupakan kemungkinan umur yang dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu serta dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu Anak Lahir Hidup (ALH)

dan Anak Masih Hidup (AMH). Nilai maksimum harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP digunakan untuk menghitung indeks harapan hidup. Angka tertinggi untuk penghitungan indeks harapan hidup adalah 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun (Badan Pusat Statistik, 2015).

2.1.10. Hubungan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Penduduk dengan tingkat kesehatan yang lebih baik merupakan input yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pengurangan tingkat kemiskinan karena semakin tinggi tingkat kesehatan suatu daerah akan menggambarkan keadaan masyarakat tersebut yang semakin sejahtera. Oleh karena itu kesehatan memiliki peranan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan karena kesehatan dan nutrisi meningkatkan produktivitas yang dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan (Strauss & Thomas, 1998).

Evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk serta meningkatkan derajat kesehatan dapat diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi akan terjadi jika setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama dan biasanya itu terjadi di negara-negara dengan tingkat kesehatan yang lebih baik.

Arsyad (1999) menjelaskan suatu alat kebijakan dari pemerintah yang penting untuk mengurangi kemiskinan adalah intervensi untuk memperbaiki kesehatan karena perbaikan kesehatan akan membuat produktivitas golongan

miskin meningkat sehingga akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan akan menaikkan output energi.

2.1.11. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2002).

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

a. Pengangguran alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja merupakan kesempatan kerja penuh dan sisanya merupakan pengangguran alamiah.

b. Pengangguran friksional

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh seseorang yang berkeinginan meninggalkan pekerjaannya supaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik

c. Pengangguran struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah:

1. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permintaan barang dari industri yang memproduksi barang-barang yang kuno menurun dan akhirnya tutup sehingga pekerja di industri ini akan menganggur. Pengangguran ini juga disebut sebagai pengangguran teknologi.
2. Persaingan dari luar negeri atau daerah lain menyebabkan kemunduran suatu negara atau wilayah. Persaingan dari luar negeri mampu

menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan membuat permintaan akan barang lokal menurun. Industri lokal yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul pengangguran.

3. Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat di kawasan lain.

d. Pengangguran konjungtur

Pengangguran yang melebihi penangguran alamiah. Pengangguran konjungtur merupakan akibat dari pengurangan dalam permintaan agregat sehingga perusahaan mengurangi jumlah pekerja dan muncul pengangguran konjungtur.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya:

a. Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah dari pada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, atau sedang mempersiapkan usaha seperti yang didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

b. Pengangguran tersembunyi

Keadaan di mana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan yang menyebabkan sebagian pekerja tidak produktif.

c. Pengangguran musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menunggu sampai masa tanam dan jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Setengah menganggur

Keadaan di mana seseorang bekerja di bawah jam kerja normal. Menurut BPS, di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengah menganggur.

2.1.12. Hubungan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2002), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Peluang seseorang terjebak dalam kemiskinan meningkat bila kesejahteraan masyarakat turun karena menganggur dan tidak memiliki pendapatan. Efek buruk akan ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan terhambat apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk.

2.1.13. Upah Minimum

Upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya karena pada dasarnya upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang.

Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2009).

Upah minimum adalah upah terendah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pekerja. Undang-undang upah minimum pertama diberlakukan di Selandia Baru tahun 1984. Amerika Serikat menerapkan upah minimum nasional dengan diloloskannya Akta Standar Tenaga Kerja yang Adil tahun 1938, meskipun banyak negara bagian memiliki undang-undang upah jauh sebelumnya (Case, Fair, & Oster, 2012)

Menurut Sumarsono (2003) upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun keluarga.

Menurut Rachman (2005), Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu:

- a. Sebagai kontrol agar upah tidak turun tajam.
- b. Mengurangi ketidakmerataan antara upah yang paling rendah dengan upah yang paling tinggi di perusahaan.
- c. Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk:

- a. Pemerataan pendapatan

- b. Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja
- c. Perubahan struktur biaya industri sektoral
- d. Peningkatan produktivitas kerja nasional dan peningkatan etos dan disiplin kerja
- e. Memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja merupakan tujuan dari penetapan upah minimum. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikan produktivitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Pada awalnya Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia menetapkan upah minimum secara terpusat. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum

ditetapkan oleh masing-masing provinsi. Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral.

1. Upah Minimum Regional

Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan bagi pekerja tingkat paling bawah. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM kabupaten/kota).

2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk.I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP 226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka Upah Minimum Sektoral

Provinsi (UMSP) merupakan perubahan istilah dari Upah Minimum Sektor Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) merupakan perubahan istilah dari Upah Minimum Sektor Regional Tingkat II (UMSR Tk. II).

Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut: kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat dioperasionalkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyebutkan formula perhitungan upah minimum adalah sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

Di mana: UM_n adalah upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t adalah upah minimum tahun berjalan

$Inflasi_t$ adalah Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

ΔPDB_t adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak. Perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan secara langsung akan mengoreksi upah minimum yang akan ditetapkan yang akan menyesuaikan nilai kebutuhan hidup layak. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.

Peningkatan produktivitas secara keseluruhan terukur dalam nilai pertumbuhan ekonomi dalam penyesuaian upah minimum. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Peningkatan

upah minimum menggunakan seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dalam formula ini. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

2.1.14. Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat kemiskinan

Pemenuhan standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja merupakan sasaran dari ditentukannya upah minimum. Meningkatnya derajat penduduk berpendapatan rendah merupakan tujuan dari upah minimum. Harapannya pendapatan masyarakat dan kesejahteraan akan meningkat seiring dengan meningkatnya upah minimum sehingga masyarakat terbebas dari kemiskinan (Kaufman & Hotchkiss, 2000).

2.2. Kajian Literatur

Olavaria-Gambi (2003) dalam jurnalnya yang berjudul “*Poverty Reduction in Chile : Has Economic Growth Been Enough?*” bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan di Chili pada tahun 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, dan 1998. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model ekonometri sebagai berikut:

$$Pov_{rt} = \beta_1 + \beta_2 GDP_{rt} + \beta_3 Edu_{rt} + \beta_4 HSt_{rt} + \beta_5 BG_{rt} + \beta_6 RD_{rt} + \beta_7 CY_{rt} + \beta_8 PrP_{rt} + e_{rt}$$

Di mana,

Pov : Kemiskinan

GDP : Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Bruto per kapita

Edu : Tingkat pendidikan

HSt : Status kesehatan

RD : Kontrol untuk perbedaan region

CY : Tahun pada saat dilaksanakannya survei *Enruesta de Caracterizacio ´n Socioeconomica Nacional (CASEN)*

PrP : Periode presiden

e : *Error term*

r, t : Region dan tahun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik PDB maupun PDB per kapita, tingkat pendidikan di atas rata-rata, dan kesehatan berhubungan negatif dengan kemiskinan, sementara tingkat pendidikan yang lebih rendah dari rata-rata, tingkat melek huruf yang minimal serta penyakit berhubungan positif dengan kemiskinan.

Bakhtiari dan Meisami (2010) dalam jurnalnya “*An Empirical Investigation of the Effects of Health and Education on Income Distribution and Poverty in Islamic Countries*” ingin mengetahui dampak kesehatan dan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan di 37 negara Islam pada delapan periode dari tahun 1970 hingga 2005 dengan model sebagai berikut:

$$Q_{it} = \beta_0 + \sum \beta_1 Y_{it-1} + \sum \beta_2 H_{it-1} + \sum \beta_3 S_{it-1} + \sum \beta_4 E_{it-1} + U_{it}$$

Di mana,

Q: Ketimpangan yang diukur dengan Koefisien Gini

Y: Tingkat pendapatan (dengan pengukuran PDB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan persentase pengeluaran pendidikan dari PDB)

H: Status kesehatan

S: Tingkat tabungan domestik

E: Tingkat pendidikan

U: *error term*

Menggunakan data panel dan metode *fixed effect*, hasilnya tingkat pendapatan, status kesehatan, tingkat tabungan domestik, dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Selanjutnya, dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, model ekonometri sebagai berikut:

$$P_{it} = \beta_0 + \sum\beta_1 Y_{it-1} + \sum\beta_2 H_{it-1} + \sum\beta_3 S_{it-1} + \sum\beta_4 E_{it-1} + U_{it}$$

Di mana,

P: Tingkat kemiskinan

Y: Tingkat pendapatan (dengan pengukuran PDB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan persentase pengeluaran pendidikan dari PDB)

H: Status kesehatan

S: Tingkat tabungan domestik

E: Tingkat pendidikan

U: *error term*

Menggunakan data panel dan metode *fixed effect*, hasilnya tingkat pendapatan, status kesehatan, tingkat tabungan domestik, dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Agrawal (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “*Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhstan*” menganalisis dan memberikan

bukti mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan digunakan analisis regresi ekonometrik dengan panel data pada setiap provinsi periode 2000 – 2002, dengan metode *Generalized Least Square* dengan *cross section weights (fixed effect)*. Model dan hasil untuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$\Delta Poverty = -0.113 GROWTHPc \quad (1)$$

Pertumbuhan ekonomi yang diproksi melalui PDB per kapita dapat menurunkan tingkat kemiskinan di setiap provinsi di Kazakhstan.

Agrawal mengembangkan model tersebut dengan menambahkan variabel ketimpangan (koefisien Gini). Studi *World Bank* pada 88 instansi menunjukkan bahwa negara yang memiliki pertumbuhan PDB per kapita yang positif, ketimpangan juga meningkat lebih dari setengahnya. Menggunakan data panel dan metode *fixed effect*, hasilnya adalah sebagai berikut:

$$\Delta Poverty = -0.097 GROWTHPc + 50.701 INEQUALITY \quad (2)$$

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengurangi kemiskinan dan ketimpangan meningkatkan kemiskinan.

Selanjutnya, model (3) menambahkan variabel pengangguran dan upah riil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi artinya meningkatnya produksi barang dan jasa, yang membutuhkan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan peningkatan tenaga kerja akan meningkatkan upah riil. Menggunakan data panel dan metode *fixed effect*, hasilnya adalah sebagai berikut:

$$\Delta Poverty = -0.090 GROWTH_{pc} + 0.960 INEQUALITY + 1.440\Delta UNEM - 0.256\Delta RWAGE \quad (3)$$

Hasilnya adalah peningkatan pengangguran meningkatkan kemiskinan, meskipun peningkatan pada upah riil menurunkan tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, Agrawal menganalisis pengaruh antara pengeluaran pemerintah terutama di bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan. Kesehatan dan pendidikan merupakan dasar dari produktivitas kerja, kapasitas untuk belajar, dan kemampuan untuk tumbuh secara intelektual, fisik, dan emosional. Data pengeluaran untuk sektor sosial per kapita ini hanya tersedia di tingkat provinsi pada tahun 2002. Menggunakan metode regresi *cross section*, hasilnya sebagai berikut:

$$\Delta Poverty = 38.94 - 0.00134 SocExpPC \quad (4)$$

Hasil ini jelas menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita pada sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan. Demikian pula dengan menggunakan pengeluaran pemerintah sektor sosial sebagai persentase PDB. Menggunakan data panel pada tingkat provinsi untuk tahun 2000 dan 2003 serta menggunakan metode *fixed effect*, hasilnya adalah sebagai berikut:

$$\Delta Poverty = -1.022 SocExp/GDP \quad (5)$$

Kesimpulannya penurunan tingkat kemiskinan ditekankan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi. Bantuan pemerintah pada kemiskinan bergantung pada pendapatan pemerintah. Pertumbuhan dikatakan *propoor* jika pembagian

pendapatan kaum miskin meningkat atau setidaknya pendapatan meningkat secara absolut.

Stevens dan Sessions (2001) dalam penelitiannya yang berjudul “*Minimum Wage Policy and Poverty in the United States*” menganalisis tentang pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Amerika Serikat dengan memasukkan variabel-variabel penting lainnya seperti pasar tenaga kerja dan faktor demografi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari 48 negara bagian di Amerika Serikat dari tahun 1984 hingga 1998. Penelitian ini menggunakan model *random effect* dengan persamaan:

$$Y_{it} = X_{it}\gamma_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

Y : tingkat kemiskinan

X : Variabel-variabel penjelas (Upah minimum, *Minimum Coverage Wage*, Rata-rata upah riil, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Pertumbuhan pekerja tahunan, Proporsi pekerja di bidang industri produksi barang, Persentase rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan, Persentase populasi bukan berkulit putih, dan Rasio pekerja dengan berpendidikan perguruan tinggi dan pekerja dengan berpendidikan SMA)

ε : *Error term*

i : Negara bagian

t : Tahun

Hasilnya, peningkatan upah minimum, *minimum coverage wage*, rata-rata upah riil, tingkat partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan jumlah pekerja, proporsi

pekerja di bidang industri produksi barang, serta rasio pekerja dengan berpendidikan perguruan tinggi dan pekerja dengan berpendidikan SMA akan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan sedangkan persentase rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan yang lebih sedikit akan berdampak kepada penurunan kemiskinan secara signifikan. Adapun variabel persentase populasi bukan berkulit putih berpengaruh negatif terhadap kemiskinan namun tidak signifikan.

Marinho, dkk. (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “*Impact of Infrastructure Expenses in Strategic Sectors for Brazilian Poverty*” ingin mengetahui dampak dari investasi di bidang infrastruktur terhadap penurunan kemiskinan di Brazil, dengan variabel kontrol lainnya sebagai determinan dari kemiskinan di antaranya pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran dan anggaran pemerintah dari tahun 1995 sampai tahun 2011. Penelitian ini menggunakan model panel data dinamis yang diestimasi menggunakan *generalized method of moments* dengan model sebagai berikut:

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 P_{it-1} + \beta_2 inf_{it} + \beta_3 pib_{it} + \beta_4 aem_{it} + \beta_5 gini_{it} + \beta_6 regov_{it} + \beta_7 des_{it} + \mu_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

P_{it} : Tingkat kemiskinan

inf_{it} : Indeks infrastruktur

pib_{it} : Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita

aem_{it} : Rata-rata lama sekolah

$gini_{it}$: Indeks Gini

$regov_{it}$: Anggaran pendapatan pemerintah

des_{it} : Tingkat pengangguran

μ_{it} : *unobserved unit effects*

ε_{it} : *random disturbances*

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa investasi di bidang infrastruktur, PDB per kapita, rata-rata lama sekolah, peningkatan anggaran pendapatan pemerintah akan berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, sedangkan tingkat pengangguran dan kesenjangan pendapatan akan meningkatkan kemiskinan secara signifikan.

Miranti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Understanding the Relationships between Development Factors and Regional Poverty: What Have We Learned from Indonesia?*” ingin mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan kemiskinan regional di Indonesia setelah diberlakukannya desentralisasi, tepatnya penelitian ini menggunakan data provinsi tahun 2006 hingga 2011 dengan model sebagai berikut:

$$\ln P_{i,t} = p_0 + p_1 \ln INCOME_{i,t} + p_2 \ln HC_{i,t} + p_3 \ln LIV_{i,t} + p_4 \ln TRANS_{i,t-1} \\ + p_5 \ln MIG_{i,t-1} + p_6 \ln DIS_i + \varepsilon_{i,t}$$

Di mana:

$P_{i,t}$: Jumlah penduduk miskin

$INCOME_{i,t}$: PDRB per kapita

$HC_{i,t}$: Rata-rata lama sekolah

- $\ln LIV_{i,t}$: Kondisi hidup untuk proporsi rumah tangga dengan air minum bersih
- $TRANS_{i,t-1}$: Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) antar pemerintah per kapita
- $MIG_{i,t-1}$: Migrasi yang dipecah menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar, yang merupakan tingkat pendatang baru (1/1000)
- DIS_i : Jarak dari masing-masing provinsi dan Jakarta
- ε : *Error term*

Menggunakan data panel dengan estimasi *generalized method of moments*, hasilnya PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, dan penyediaan air bersih berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Jarak yang lebih jauh dari pusat pembangunan ekonomi – Jakarta, akan berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan. Penelitian tersebut tidak menemukan temuan yang kuat terkait dengan migrasi dan transfer DAU antar pemerintah.

Tabel 2.1. Variabel-Variabel dan Kesimpulan Penelitian Sebelumnya

No.	Penulis	Tujuan	Variabel	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Mauricio Olavarria-Gambi (2003)	Menganalisis hubungan antara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan di Chili	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemiskinan <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDB dan PDB per kapita • Tingkat pendidikan • Status kesehatan • Dummy region • Dummy Survey CASEN • Dummy periode presiden 	Regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"> • Baik PDB maupun PDB per kapita, tingkat pendidikan di atas rata-rata, dan kesehatan berhubungan negatif dengan kemiskinan. • Tingkat pendidikan yang lebih rendah dari rata-rata, tingkat melek huruf yang minimal serta penyakit berhubungan positif dengan kemiskinan.
2.	Sadegh Bakhtiari & Hossen Meisami (2010)	Mengetahui dampak kesehatan dan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan • Kemiskinan <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendapatan (PDB per kapita, Indeks pembangunan 	<i>Fixed Effect Model</i>	Tingkat pendapatan, status kesehatan, tingkat tabungan 45industry, dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.

		kemiskinan di 37 negara Islam	manusia, dan persentase pengeluaran pendidikan dari PDB)		
			<ul style="list-style-type: none"> • Status kesehatan • Tingkat tabungan • Tingkat pendidikan 		
3.	Pradeep Agrawal (2008)	Mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemiskinan <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDB per kapita • Kesenjangan • Pengangguran • Upah riil • Pengeluaran sosial per kapita • Pengeluaran pemerintah sosial sebagai persentase PDB 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Generalized Least Square</i> dengan <i>cross section weights (fixed effect)</i>(pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan) • <i>Fixed effect</i> (pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, pengangguran, dan upah riil terhadap kemiskinan ; pengeluaran pemerintah 46ndust sosial sebagai persentase PDB terhadap kemiskinan) • Regresi <i>cross section</i> (pengeluaran pemerintah 46ndust sosial per kapita terhadap kemiskinan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat kemiskinan ditekankan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan ekonomi, upah riil, pengeluaran pemerintah 46ndust sosial berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan. • Kesenjangan dan pengangguran akan meningkatkan kemiskinan.
4.	Lonnie K. Stevans &	Menganalisis tentang pengaruh	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan 	<i>Random Effect Model</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upah minimum, <i>minimum coverage</i> wage, rata-

David N. Sessions (2001) upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Amerika Serikat dengan memasukkan variabel-variabel penting lainnya

Variabel independen:

- Upah minimum
- *Minimum Coverage Wage*
- Rata-rata upah riil
- Tingkat partisipasi angkatan kerja
- Pertumbuhan pekerja tahunan
- Proporsi pekerja di bidang Industri produksi barang
- Persentase rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan
- Persentase populasi bukan berkulit putih
- Rasio pekerja dengan berpendidikan perguruan tinggi terhadap pekerja dengan berpendidikan SMA

rata upah riil, tingkat partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan jumlah pekerja, proporsi pekerja di bidang industry produksi barang, serta rasio pekerja dengan berpendidikan perguruan tinggi dan pekerja dengan berpendidikan SMA akan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

- Persentase rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan yang lebih sedikit akan berdampak kepada penurunan kemiskinan secara signifikan.
- Variabel persentase populasi bukan berkulit putih berpengaruh negatif terhadap kemiskinan namun tidak signifikan.

5.	Emerson Marinho, dkk (2017)	Mengetahui dampak dari investasi di bidang infrastruktur terhadap penurunan kemiskinan di Brazil, dengan beberapa variabel kontrol lainnya sebagai determinan dari kemiskinan di Brazil.	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemiskinan <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks infrastruktur • PDB per kapita • Rata-rata lama sekolah • Indeks Gini • Anggaran pendapatan pemerintah • Tingkat pengangguran 	Panel data dinamis yang diestimasi dengan <i>Generalized Method of Moments</i> (GMM)	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi di bidang infrastruktur, PDB per kapita, rata-rata lama sekolah, peningkatan anggaran pendapatan pemerintah akan berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. • Tingkat pengangguran dan kesenjangan pendapatan akan meningkatkan kemiskinan secara signifikan.
6.	Riyana Miranti (2017)	Mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan kemiskinan regional di Indonesia setelah	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk miskin <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDRB per kapita • Rata-rata lama sekolah • Proporsi rumah tangga dengan air bersih 	<i>Generalized Method of Moments</i> (GMM)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, dan penyediaan air bersih berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. • Jarak yang lebih jauh dari pusat pembangunan ekonomi – Jakarta, akan berkontribusi

diberlakukannya
desentralisasi

- Transfer DAU antar pemerintah
- Jarak dari masing-masing provinsi dan Jakarta

terhadap peningkatan kemiskinan.

- Tidak ada pengaruh yang kuat terkait dengan migrasi dan transfer DAU antar pemerintah.
-

Sumber: Jurnal penelitian sebelumnya

2.3. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, dalam penelitian ini dijadikan sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu daerah yaitu Provinsi Jawa Tengah. Semakin bagus perekonomian suatu daerah dapat menurunkan tingkat kemiskinan daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan suatu masalah yang sangat berhubungan dengan jumlah penduduk miskin. Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya distribusi pendapatan perlu diperhatikan karena pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga.

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara. Tingginya kemampuan seseorang dalam membayar berbagai pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena tingkat pendapatan seseorang juga tinggi. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah, dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut. Pendidikan berperan dalam mempengaruhi angka

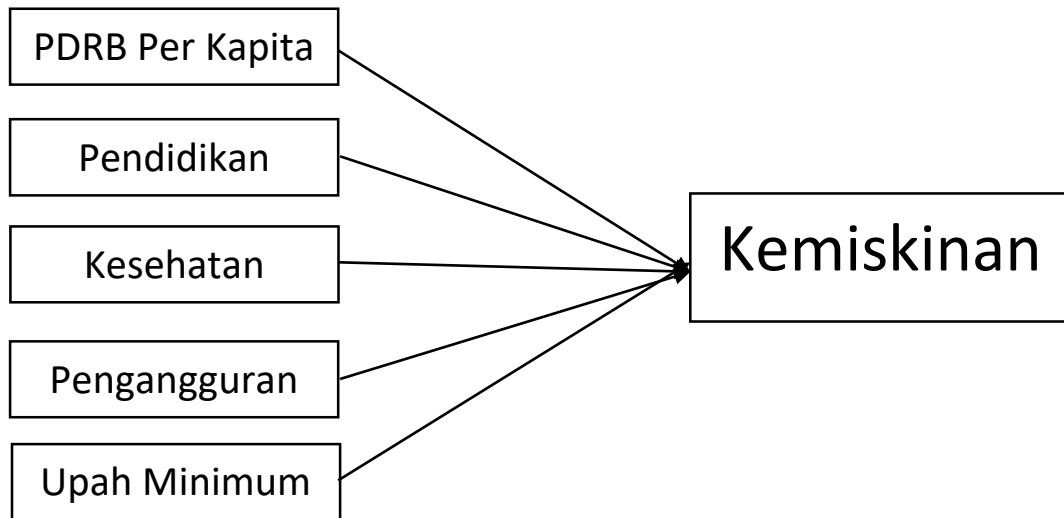
kemiskinan. Memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai peluang yang rendah menjadi miskin. Melalui pendidikan akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Kesejahteraan yang lebih baik yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan maupun konsumsinya akan diperoleh ketika seseorang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

Kesehatan juga dapat memengaruhi kemiskinan. Seseorang yang tersentuh oleh fasilitas kesehatan akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Angka harapan hidup menunjukkan seberapa besar kualitas kesehatan di suatu wilayah. Rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesehatan akan mempersulit kemampuan untuk menangkis penyakit. Hal tersebut akan berdampak kepada kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas kesehatan suatu wilayah akan mengurangi angka kemiskinan.

Terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan sulitnya bagi sebagian angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sehingga seseorang tidak memiliki pendapatan. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran yang dapat menyebabkan kemiskinan.

Upah minimum mencerminkan pendapatan yang diterima pekerja, adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penetapan upah minimum yang pantas dan tepat diharapkan mendorong penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi upah maka semakin tinggi pendapatan dan mengakibatkan kesejahteraan pekerja terpenuhi. Dengan demikian akan mampu hidup layak sehingga tingkat kemiskinan akan turun.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka (Martono, 2011). Berkaitan dengan penelitian ini maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diduga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.
2. Variabel kesehatan diduga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.
3. Variabel pendidikan diduga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.
4. Variabel pengangguran diduga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.
5. Variabel upah minimum diduga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.